

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK TAHUN 2025 MELALUI SOSIALISASI INTERNAL DI BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KANWIL KEMENKUM BALI

NAMA : Isya Nalapraja, S.H., M.H.
NIP : 197910122003121002
JABATAN : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
SATUAN KERJA : Kanwil Kementerian Hukum Bali

PELATIHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola organisasi sektor publik yang bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif serta mengoptimalkan peluang dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks pelayanan publik, khususnya pada unit kerja yang menangani bidang Kekayaan Intelektual, penerapan manajemen risiko menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas layanan yang melibatkan verifikasi dokumen, pengelolaan data, sistem aplikasi, hingga interaksi langsung dengan masyarakat.

Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah merupakan wadah pembelajaran strategis untuk memperkuat kapasitas pejabat struktural dalam mengelola risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai siklus manajemen risiko mulai dari identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian, tetapi juga mendorong peserta untuk mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam proses kerja harian di lingkungan organisasi.

Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, khususnya di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, pelatihan ini memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan setiap satuan kerja memiliki mekanisme pengendalian internal dan strategi mitigasi risiko yang efektif. Oleh karena itu, implementasi hasil pelatihan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman pegawai terhadap konsep manajemen risiko, serta penanaman budaya sadar risiko sebagai fondasi perbaikan layanan yang berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas partisipasi dalam Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025,

serta sebagai wujud nyata implementasi hasil pelatihan di lingkungan kerja. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip manajemen risiko kepada jajaran pegawai di Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, guna meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan atau hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran proses layanan publik.

Tujuan dari penyusunan dan implementasi hasil pelatihan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap konsep manajemen risiko dan peran pentingnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.
2. Membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya mengidentifikasi dan menanggulangi risiko sejak dini, khususnya dalam proses layanan administrasi Kekayaan Intelektual.
3. Mendorong penerapan pendekatan risiko secara sistematis dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik.
4. Menjadi langkah awal pembentukan budaya sadar risiko, dengan menanamkan kebiasaan pencatatan, evaluasi, dan tindak lanjut risiko sebagai bagian dari siklus kerja.
5. Memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan kerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup implementasi hasil Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 ini mencakup kegiatan internalisasi pemahaman, identifikasi risiko awal, dan pembentukan kesadaran kolektif terhadap pentingnya manajemen risiko di lingkungan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Secara lebih spesifik, ruang lingkup laporan ini meliputi:

- A. Sosialisasi konsep manajemen risiko kepada pejabat dan pegawai pelaksana di subbidang pelayanan Kekayaan Intelektual melalui kegiatan berbagi pengetahuan (sharing knowledge).

- B. Penyampaian materi pelatihan secara kontekstual, termasuk prinsip dasar manajemen risiko, siklus pengelolaan risiko, serta penerapannya dalam proses layanan publik, khususnya dalam pengelolaan permohonan hak kekayaan intelektual.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025, penulis telah melakukan kegiatan implementatif di lingkungan kerja, khususnya pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Kegiatan tersebut berupa sosialisasi hasil pelatihan kepada rekan kerja, khususnya pegawai yang berada di garis depan pelayanan publik Kekayaan Intelektual.

Langkah awal yang dilakukan adalah menyampaikan hasil pelatihan kepada para pegawai pelaksana layanan pada Bidang KI. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk forum diskusi internal yang bertujuan untuk membagikan pemahaman mengenai konsep dasar manajemen risiko di sektor publik, serta pentingnya pengelolaan risiko dalam menunjang efektivitas dan keberlanjutan layanan administrasi Kekayaan Intelektual.

Adapun materi yang disampaikan dalam forum ini meliputi:

1. Pengertian dan prinsip dasar manajemen risiko dalam organisasi sektor publik.
2. Tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko sebagai alat pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja.
3. Contoh penerapan manajemen risiko dalam proses pelayanan publik, khususnya dalam konteks layanan KI.
4. Kaitan manajemen risiko dengan peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan akuntabilitas dan integritas organisasi.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada para pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan organisasi yang berorientasi pada kinerja dan hasil. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai terhadap pentingnya mengenali dan menangani risiko sejak dini, baik yang bersifat teknis, administratif,

maupun sistemik. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendorong para pegawai agar mampu mengidentifikasi potensi risiko dan titik-titik rawan dalam proses layanan Kekayaan Intelektual, serta bersama-sama merumuskan strategi perbaikan melalui pendekatan pengendalian yang lebih terstruktur dan terukur. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama dalam menciptakan budaya kerja yang lebih responsif terhadap risiko, tertib dalam dokumentasi, serta berorientasi pada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

C. HASIL YANG DICAPAI

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan kepada pegawai pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual memberikan sejumlah dampak positif terhadap peningkatan kapasitas internal dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas. Forum diskusi yang dilaksanakan secara terbuka dan interaktif berhasil menggugah pemahaman pegawai mengenai konsep dasar manajemen risiko serta keterkaitannya dengan proses pelayanan publik yang mereka jalankan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, pegawai mulai menyadari bahwa risiko tidak hanya sebatas kejadian yang mengganggu, tetapi merupakan bagian yang harus dikenali, dianalisis, dan ditangani secara terukur agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam diskusi, beberapa potensi risiko berhasil diidentifikasi secara langsung, seperti keterlambatan verifikasi berkas permohonan, ketergantungan pada sistem informasi layanan yang belum stabil, hingga kemungkinan duplikasi data akibat kurangnya prosedur dokumentasi yang baku.

Selain itu, kegiatan ini juga membentuk komitmen awal dari pegawai untuk lebih memperhatikan aspek pencatatan, pelaporan, dan pelacakan risiko di masing-masing unit tugas. Peserta forum mengusulkan agar ke depan dibentuk mekanisme pencatatan risiko secara rutin, serta pentingnya peran pimpinan dalam

memfasilitasi budaya sadar risiko yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada perbaikan sistem kerja.

Secara umum, kegiatan ini menjadi pondasi awal yang baik dalam mendorong penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di lingkungan kerja, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal yang mendukung layanan Kekayaan Intelektual yang lebih berkualitas, terukur, dan akuntabel.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 kepada pegawai pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan risiko mulai tumbuh di lingkungan kerja. Kegiatan ini tidak hanya berhasil menyampaikan materi konseptual mengenai manajemen risiko, tetapi juga mendorong identifikasi langsung terhadap berbagai potensi risiko yang selama ini belum terdokumentasi secara sistematis. Pegawai mulai memahami bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari proses kerja yang harus dikelola secara bijak dan terencana. Melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, kegiatan ini membangun komitmen awal untuk memperkuat sistem kerja yang lebih tertib, terdokumentasi, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disarankan agar proses penguatan manajemen risiko dilanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dan terstruktur, seperti:

1. Menyusun profil risiko unit kerja, membentuk tim pencatatan dan pemantauan risiko
2. Menyusun mekanisme pelaporan risiko secara berkala
3. Perlu juga dilakukan evaluasi rutin terhadap potensi risiko layanan agar organisasi lebih siap dalam menghadapi perubahan, gangguan, atau krisis.

E. PENUTUP

Kegiatan sosialisasi hasil Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025 yang telah dilaksanakan di lingkungan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran dan budaya sadar risiko di tempat kerja. Melalui kegiatan ini, pegawai mendapatkan pemahaman dasar mengenai konsep dan pentingnya pengelolaan risiko, serta mulai menunjukkan komitmen untuk mendokumentasikan dan merespons risiko secara lebih terstruktur.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi fondasi bagi penguatan sistem manajemen risiko yang lebih menyeluruh di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan Kekayaan Intelektual. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas partisipasi dalam pelatihan dan sebagai bukti nyata implementasi hasil pembelajaran dalam tugas kedinasan. Semoga upaya ini dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perbaikan sistem kerja dan pencapaian kinerja organisasi.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Wayan Redana



Penulis, 17 Juli 2025

Isya Nalapraja

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
Jalan Raya Mr. Moch Ichsan No. 114, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Semarang – Jawa Tengah
Telepon : (024) 35320020, laman: badiklat-jateng.kemenkumham.go.id
pos-el: badiklat.kumhamjateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13.SDM.SDM.1.SM.02.04-70
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Implementasi Hasil Pelatihan
Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025

14 Juli 2025

Yth. Daftar Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Tahun 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik telah dilaksanakan secara PJJ pada tanggal 14 – 20 Mei 2025 dalam 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang;
2. Berdasarkan kriteria kelulusan dan kualifikasi penilaian sesuai pedoman pelaksanaan yang berlaku, seluruh peserta dinyatakan lulus;
3. Sebagai tindak lanjut evaluasi, terdapat pengukuran untuk menilai dampak dan kebermanfaatan pelatihan dengan mengimplementasikan hasil pelatihan melalui *sharing knowledge* oleh alumni pelatihan di satuan kerja masing-masing;
4. Bahwa alumni pelatihan yang dinyatakan lulus agar menyusun Laporan Implementasi Hasil Pelatihan dan mengirimkan melalui link <https://forms.gle/v8TtKj942YkGr8aV6> paling lambat hari Senin, 21 Juli 2025 (format laporan terlampir);
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Program dan Evaluasi, narahubung Shauma Ghafar (087832327475) atau Elsida Yuni (085210512508)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rinto Gunawan Sitorus

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal.

Lampiran I

Nomor : W.13.SDM.SDM.1.SM.02.04-70

Tanggal : 14 Juli 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I.Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rinto Gunawan Sitorus

Lampiran II

Nomor : W.13.SDM.SDM.1.SM.02.04-70

Tanggal : 14 Juli 2025

**DAFTAR ALUMNI PESERTA
PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
TAHUN 2025**

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	SATUAN KERJA
1	Toni Sugiarto. AKS., MSi	197307201994031001	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Jawa Tengah
2	Budi Haryono, S.H.,M.Si	196803171988031001	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Kalimantan Tengah
3	Agustinus Yosi Setyawan, S.H., M.H.	197708112001121001	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Jawa Tengah
4	Nanda Zannibua Harisma,ST.,MTi	198705052009121004	Kasi Harta Peninggalan Wilayah III	BHP Semarang
5	Djoko Sedyanto, S.H	197107131993031001	Kasi Harta Peninggalan Wilayah I	BHP Semarang
6	Meirina Saeksi, S.H., M.H.	196805111991032002	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Jawa Timur
7	Dr. Mustiqo Vitra Ardhiansyah, S.IP., M.Si., M.H.	197501092001121002	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Jawa Timur
8	Pahlevi Witantra, S.H.,M.H.	198811072012121003	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Jawa Timur
9	Hendra Andy Satya Gurning, S.H., M.H.	197505292001121001	Kepala Bhp	BHP Surabaya
10	Dian Megawati, S.H., M.H.	197612132006042001	Kasi Harta Peninggalan Wilayah I	BHP Surabaya
11	Yudi Arto, S.H., M.M.	197506101997031001	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil D.I.Yogyakarta
12	Yustina Elistya Dewi, S.Sos, M.Si.	197409292001122002	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil D.I.Yogyakarta
13	Retno Dewi Banowati, S.Si.,M.H.	197608072001122001	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil D.I.Yogyakarta
14	I Nengah Sukadana, S.H., M.H.	197703042001121002	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Bali
15	I Wayan Adhi Karmayana, S.H., M.H.	197406052001121001	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Bali
16	Isya Nalapraja, S.H., M.H.	197910122003121002	Ka Bid Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Bali
17	Yohanis Bely	197801282006041001	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Nusa Tenggara Timur
18	Stefanus Lesu	197709212005011001	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Nusa Tenggara Timur
19	Muhamad Amin Imran, S.H., M.H.	197906102000031002	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Nusa Tenggara Barat
20	Puan Rusmayadi, S.H., M.H.	197712032005011001	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Nusa Tenggara Barat
21	Dewi Woro Lestari, S.H., M.H.	197211301992032002	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Kalimantan Selatan
22	Riswandi, S.H., M.H.	197701192001121001	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Kalimantan Selatan
23	Erwin Budiyanto, S.E.,M.Si	198211232001121001	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Kalimantan Timur

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	SATUAN KERJA
24	Santi Mediana Panjaitan, S.H.,M.H	197805242001122001	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Kalimantan Timur
25	Dr. Mia Kusuma Fitriana, S.H.,M.Hum	198302082009012005	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Kalimantan Timur
26	Ferry Indrawan, S.E., M.Si	197904242005011001	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Kalimantan Barat
27	Devy Wijayanti, S.H., M.H.	197001181991032001	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual	Kanwil Kalimantan Barat
28	Deswati, S.H., M.H.	197710262001122002	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Kalimantan Barat
29	Deny Harlianto, S.E.	197605262009121002	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Kanwil Kalimantan Tengah
30	Khudloifah, S.H., M.H.	197010141991032001	Kepala Bidang Pelayanan AHU	Kanwil Kalimantan Tengah



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Rinto Gunawan Sitorus

Lampiran III

Nomor : W.13.SDM.SDM.1.SM.02.04-70

Tanggal : 14 Juli 2025

FORMAT PENYUSUNAN LAPORAN :

1. Halaman Judul (Cover)
2. Isi Laporan :
 - A. Pendahuluan
 1. Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Ruang Lingkup
 - B. Kegiatan yang Dilaksanakan
 - C. Hasil yang Dicapai
 - D. Simpulan dan Saran
 - E. Penutup
3. Lampiran (dokumentasi)

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



(JUDUL IMPLEMENTASI)

.....
.....

NAMA :
NIP :
JABATAN :
SATUAN KERJA :

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**